

PENGEMBANGAN NILAI NILAI DEMOKRASI PANCASILA DI SEKOLAH DASAR

Nazwa Kurnia Agustin¹, Ratna², Riska Amelia³

nazwaagustinkurnia@gmail.com¹, ratnaagustiani9@gmail.com², riskaameliaa0711@gmail.com³

Universitas Primagraha

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan dipegang oleh rakyat yang menentukan dan menentukan pilihan, dan pelaksanaan kebijakan tertinggi dilakukan oleh kantor perwakilan. Indonesia dalam upaya mencapai demokrasi telah melalui beberapa fase dan kini saatnya melakukan perubahan. Evolusi masyarakat Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk pembentukan partai politik dan berkembangnya sistem multi partai di Indonesia. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memahami seluk-beluk demokrasi Indonesia dan tantangan-tantangan yang terkait dengannya. Masyarakat demokratis tentunya mendukung keberadaan partai politik sebagai landasan demokrasi atau dalam pencapaian kedaulatan rakyat. Implementasi demokrasi di bawah pendudukan dicapai melalui penyelenggaraan pemilihan umum. Pengelolaan studi ini menawarkan wawasan mengenai pentingnya ilmu proses demokrasi di Indonesia dan tantangan-tantangan yang terkait dengannya. Dalam demokrasi masa kini, masyarakat mempunyai peran sebagai pemegang otoritas tertinggi dan memiliki pengetahuan komprehensif tentang semua aspek penyelenggaraan pemilu. Demokrasi Pancasila mempunyai landasan kognisi yang lebih logis dan eksplisit, berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi rakyat (komunis). Demokrasi liberal mengutamakan kebebasan individu sebagai landasan menjalankan prinsip demokrasi. Ide yang mendasarinya didasarkan pada konsep otonomi manusia dan kebebasan individu. Konsep demokrasi kerakyatan menjadi kerangka fundamental bagi penerapan prinsip-prinsip demokrasi di seluruh lapisan masyarakat. Premis yang mendasarinya adalah bahwa manusia ada dalam kerangka komunal. Demokrasi Pancasila menjadikan kearifan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan demokrasi. Ide dasarnya didasarkan pada premis bahwa manusia memiliki kemampuan kognitif dan terlibat dalam pemikiran sadar.

Kata Kunci: Demokrasi, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Liberal dan Komunis

PENDAHULUAN

Demokrasi muncul dari perkembangan peradaban, yang pada gilirannya merupakan hasil dari terbentuknya identitas kolektif suatu bangsa. Demokrasi memberikan kekuasaan yang besar kepada rakyat, karena mereka diakui sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Pancasila, Tunggal, and Solusi n.d., 881). Penerapan cita-cita demokrasi di sekolah sangat penting agar dapat secara efektif mengatasi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Periode ini diperkirakan akan membawa transformasi global yang signifikan dan masuk dan keluarnya beragam budaya dan peradaban dari 4.444 negara yang berbeda. Dalam masyarakat kita, sangat penting bagi sistem pendidikan untuk membina individu individu berketerampilan tinggi yang memiliki kualitas yang diperlukan untuk berkembang dalam menghadapi konflik peradaban. Persiapan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup dan ketahanan generasi mendatang (Syahindra 2019, 67).

Peserta didik adalah individu dalam masyarakat, berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dengan menggunakan teknik, jenjang, dan bentuk pendidikan tertentu sepanjang proses pembelajaran. peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2003 yang dikenal dengan peraturan perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional, diatur

dalam pasal 3 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan pembangunan menyeluruh dan menumbuhkembangkan jati diri dan kebudayaan nasional yang terhormat dalam rangka kemajuan. Tujuan Kehidupan Nasional Intelektual adalah untuk menumbuhkan kapasitas siswa untuk memiliki iman yang teguh dan rasa hormat kepada Tuhan, menunjukkan karakter yang berbudi luhur, menjaga kesehatan, memperoleh pengetahuan, menunjukkan kompetensi, menumbuhkan kreativitas, dan mencapai kemandirian. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemampuan terpendam peserta didik dan membentuknya menjadi individu yang memiliki loyalitas teguh, nilai moral yang kuat, dan komitmen terhadap prinsip demokrasi. Memenuhi tugas dan kewajiban anggota masyarakat yang teliti.

Prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi landasan pendidikan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan Indonesia. Saat ini, sejumlah besar pelajar dan generasi muda mengalami kerusakan moral karena berbagai faktor, seperti pengaruh globalisasi, teman sebaya, media elektronik, zat-zat seperti narkoba dan alkohol, dan kekuatan merugikan lainnya. Permasalahan ini cukup memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian khusus. Mereka adalah penerus generasi tua dan akan terus berjuang membela negara Indonesia. Sebelum mereka terlibat dalam pertumbuhan negara, prinsip-prinsip moral dan etika mereka telah dikompromikan. Tentu saja, jika bangsa ini didirikan oleh generasi yang tidak memiliki prinsip moral, maka kemajuan dan pertumbuhannya pasti akan terhambat. Oleh karena itu, penyempurnaan perlu dilakukan untuk memastikan generasi penerus bangsa memiliki prinsip-prinsip etika yang terpuji (Kartini and Dewi 2020, 113).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkaitan dengan data numerik. Namun tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis secara rinci mengenai strategi yang digunakan guru di SDN SERANG 8 dalam menumbuhkan cita-cita Pancasila di lingkungan sekolah. Hal ini termasuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengilustrasikan teknik yang digunakan oleh guru. Dalam penelitian ini, peneliti menahan diri untuk tidak melakukan intervensi atau memberikan perlakuan khusus terhadap suatu variabel yang diperkirakan akan terjadi. Sebaliknya, seluruh tindakan, situasi, peristiwa, aspek, dan komponen dibiarkan berjalan secara alami tanpa perubahan apa pun. Teknik penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari ciri-ciri gejala alam (eksperimen). Dalam penelitian dimana peneliti memegang peranan sentral, prosedur pengumpulan data digunakan secara bersamaan, pengolahan data dilakukan secara induktif, dan temuan penelitian kualitatif lebih mengutamakan penafsiran makna daripada membuat generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi menyeluruh mengenai metode yang digunakan guru untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah di SDN SERANG 8, dengan menggunakan metodologi kualitatif.

Oleh karena itu, penelitian dipusatkan pada melakukan observasi menyeluruh dan mengumpulkan data guna memberikan jawaban yang lebih analitis. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Manfaat utama melakukan penelitian melalui wawancara adalah kemampuannya untuk mengungkap informasi yang lebih akurat dan komprehensif, sehingga menghasilkan data dengan kualitas unggul. Peneliti dapat merumuskan pertanyaan berdasarkan topik penelitian, khususnya fokus pada penanaman sila Pancasila di sekolah dasar dan penerapannya dalam aktivitas sehari-hari. Partisipan dalam penelitian ini termasuk sekelompok anak-anak yang berada di dalam lingkungan sekolah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa demokrasi dan nasionalisme yang kuat di kalangan siswa. Ketika individu memiliki komitmen yang kuat terhadap demokrasi dan nasionalisme, maka kecintaan mereka terhadap negara dan keinginan mereka untuk mempertahankan negara akan menjadi kuat dan mendalam. Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa demokrasi dan nasionalisme pada generasi muda adalah melalui pembelajaran Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru adalah individu yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan lembaga pendidikan formal. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, khususnya Pasal 10 Ayat 1 tentang Guru dan Dosen. Guru bertanggung jawab untuk mengajar, mencerahkan, dan mempersiapkan siswa. Pendidikan adalah proses menanamkan dan meningkatkan prinsip-prinsip dasar dan keyakinan yang memandu kehidupan seseorang. Pendidikan adalah proses berkelanjutan untuk memajukan dan menyempurnakan pengetahuan ilmiah dan kemajuan teknologi. Sebaliknya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan siswa. Guru dituntut untuk menunjukkan perilaku keteladanan di dalam kelas. Mengajar pada dasarnya melibatkan pemberian bimbingan kepada siswa dalam proses belajarnya. Sebagai seorang pendidik, mengajar merupakan tugas wajib dan dapat dipertanggungjawabkan yang harus dipenuhi, sehingga menjadikan proses belajar mengajar sebagai aspek sentral dalam pendidikan.

Mengajar dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan yang menciptakan keadaan yang kondusif bagi belajar siswa (Aunurrahman 2016: 34). Berdasarkan penelitian yang dilakukan SDN SERANG 8, guru PKN merupakan sosok teladan bagi anak-anaknya. Meski demikian, masih ada siswa yang melanggar peraturan sekolah atau tidak mengindahkan gurunya. Meski demikian, para pengajar sekolah, khususnya guru PKN, tetap konsisten memberikan bimbingan, bantuan, dan inspirasi. Guru senantiasa terlibat dalam memberikan bimbingan kepada anak-anak yang sering melanggar peraturan sekolah. Tugas para pembina PKN adalah konsisten menanamkan cita-cita Pancasila dan mentaati peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Pengajar PKN melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengevaluasi perilaku anak-anak yang sering melanggar peraturan sekolah. Untuk itu, secara konsisten memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan yang konstruktif kepada mahasiswa, memastikan mereka mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi prinsip Pancasila, dan menyelesaikan kewajiban kemahasiswaan.

1) Memahami Demokrasi Pancasila

Demokrasi menurut Pancasila adalah suatu bentuk pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan cita-cita yang dituangkan dalam pandangan hidup Pancasila. Indonesia dahulu menganut falsafah demokrasi Pancasila. Pengertian pengertian demokrasi tentunya bersumber dari teori kehidupan bernegara Indonesia, Pancasila. Pancasila merupakan perwujudan hakikat peradaban Indonesia, mulai dari akar sejarahnya hingga saat ini. Menganalisis Konsep Pancasila Kajian mengenai demokrasi sangatlah penting mengingat betapa pentingnya demokrasi Pancasila bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam menjamin stabilitas Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi merupakan istilah majemuk yang berasal dari kata Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat mempunyai pengaruh yang signifikan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan (Mahfud, 2003, hal.10). Sekolah, seperti

halnya bangsa, berfungsi sebagai institusi seperti miniatur masyarakat, termasuk individu dan diatur oleh seperangkat peraturan. Sekolah adalah lembaga sosial yang disengaja yang diciptakan oleh beberapa individu yang bekerja sama untuk menyelaraskan tujuan mereka guna mencapai tujuan bersama. Tujuannya adalah untuk mendidik siswa dan membimbing mereka menuju mencapai keadaan otonomi psikologis, biologis, dan sosial (Rosyada, 2004). Pendidikan demokratis mengutamakan pengembangan kemampuan akademik, pribadi, dan sosial. Dalam bidang pendidikan, penting bagi sekolah untuk menyediakan keadaan yang diperlukan agar pengetahuan akademis dapat diterapkan secara efektif pada aspek praktis masyarakat.

2) Asas Demokrasi

- a. Berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut keyakinan agama atau menolak ateisme.
- b. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini akibat amandemen kedua yang dilakukan MPR, berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan naskah pokok UUD 1945, Pasal 26 s/d 34, Pasal 28J, dan sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 2. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Kedaulatan Rakyat Sistem politik yang dianut dalam demokrasi Pancasila didasarkan pada kedaulatan rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945: ``Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- d. Dukungan Informasi Warga Peran Intelektual Dukungan warga dukungan terhadap institusi demokrasi yang sehat. Kita memerlukan sistem demokrasi. Peran tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga negara. Hasil dan keluaran dari keputusan kebijakan nasional diharapkan mempunyai nilai positif dibandingkan dengan penduduk yang berpendidikan rendah.
- e. Kepatuhan terhadap sistem pembagian kekuasaan Sistem pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia didasarkan pada undang-undang. Kekuasaan administratif, peradilan, dan audit. Lembaga ini menjadi landasan bagi berjalannya negara demokrasi untuk menghindari sentralisasi.

3) Nilai-Nilai Moral Yang Termasuk Dalam Demokrasi Pancasila

- a. Persamaan hak bagi seluruh warga negara Indonesia Kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia mencakup pemerataan hak dan kewajiban di antara masyarakat.
- b. Keseimbangan Hak dan Tanggung Jawab Prinsip moral ini mencirikan status warga negara Indonesia, yang tidak hanya berhak memperoleh hak, namun juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- c. Tunjukkan otonomi sambil memikul tanggung jawab moral penuh kepada Tuhan, diri sendiri, dan individu lain. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap orang dengan tetap memberikan batasan-batasan terhadap tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran yang konstan mengenai hak dan kewajiban dirinya sendiri dan orang lain.
- d. Mencapai persepsi keadilan sosial. Tujuan demokrasi Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial menyeluruh bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan warna kulit, suku, kelas sosial ekonomi, suku, agama, dan faktor lainnya.
- e. Pengambilan keputusan melalui pertimbangan dan diskusi yang cermat Keputusan harus dibuat secara tidak memihak, khususnya dengan melakukan diskusi yang bijaksana untuk mencapai kesepakatan. Sederhananya, pengambilan keputusan tidak boleh hanya mengandalkan mayoritas, namun juga harus mempertimbangkan

perspektif kelompok minoritas.

- f. Menjamin terpeliharanya prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Demokrasi Pancasila di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan negara ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian global.
- g. Persatuan Nasional dan Prioritas Keluarga Sesuai dengan prinsip ketiga, sangat penting bagi semua individu dalam kehidupan sehari-hari untuk mengutamakan persatuan nasional dan keluarga.

4) Tujuan Demokrasi Pancasila

- a. Memanfaatkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila untuk membantu pemerintah memahami proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan.
- b. Agar seluruh departemen di pemerintahan Indonesia dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan dasar-dasar negara ini.
- c. Merupakan jaminan bahwa pemerintah negara ini sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya dan terhadap rakyatnya.
- d. Memastikan kepatuhan yang ketat dan penerapan hukum negara ini secara efektif.
- e. Menjamin partisipasi universal rakyat Indonesia dalam urusan negara dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pemilu melalui penggunaan hak pilih mereka (Dwi Shafira 2021, 3–4).

Demokrasi Pendidikan diterapkan sebagai pendekatan pedagogi yang menumbuhkan kolaborasi dan partisipasi aktif antara pengajar dan siswa di lingkungan sekolah. Menurut Sadima dkk (1986), belajar adalah proses multifaset yang terjadi pada setiap individu dan berlangsung sepanjang hidup mereka, mulai dari masa bayi hingga tahap akhir kehidupan. Pembelajaran dapat terjadi di banyak tempat seperti rumah, sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, dan di seluruh masyarakat. Hal ini dapat terjadi dengan cara apa pun, tepatnya di lokasi mana pun, dan dari sumber mana pun. Indikasi seseorang telah memperoleh pengetahuan adalah adanya modifikasi proses kognitif, peningkatan keterampilan psikomotorik, dan perubahan sikap atau perilaku. Menurut Pribadi (2009), belajar adalah suatu proses yang bertujuan yang melibatkan perancangan kegiatan yang disengaja untuk memfasilitasi pembelajaran individu. Sedangkan pembelajaran dijelaskan oleh Gegne (sebagaimana dikutip dalam Pribadi, 2009). Belajar adalah suatu proses yang disengaja termasuk serangkaian tindakan yang dirancang untuk memfasilitasi penerapan pengetahuan.

Undang-Undang Pendidikan Umum Tahun 2003 sebagaimana tercantum dalam Departemen Pendidikan Umum (Warsita, 2008), Sikdik 1 ayat 20, mendefinisikan pembelajaran sebagai proses interaksi antara peserta didik, pengajar, dan bahan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah pertukaran timbal balik yang terjadi sepanjang proses pendidikan antara siswa dan pengajar. Pembelajaran interaktif harus mengedepankan demokrasi untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh siswa, menghilangkan segala kesenjangan. Pembelajaran demokratis ditandai dengan keterlibatan aktif siswa dalam mengungkapkan pemikirannya, terlibat dalam perdebatan, dan berpartisipasi dalam banyak tema, daripada menjadi penerima ilmu yang pasif. Pembelajaran berlangsung dalam sistem pendidikan yang beroperasi sebagai demokrasi, menumbuhkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memastikan kesempatan yang adil bagi semua siswa. Dalam demokrasi pendidikan, model pembelajaran harus menghindari lingkungan tegang yang ditandai dengan instruksi dan perintah yang berlebihan, karena hal ini dapat menyebabkan kepasifan siswa dan kurangnya semangat untuk pembelajaran secara aktif dalam diskusi antara guru dan siswa.

Dalam demokrasi Pendidikan, siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuannya. Dalam pembelajaran demokratis, pendidik atau guru berperan sebagai asisten, yaitu guru harus menawarkan siswa kesempatan untuk menemukan makna dari informasi yang mereka terima. Selain itu, guru juga berperan sebagai dinamisme, Dimana guru harus berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Guru juga berperan sebagai mediator yang membimbing siswa dan juga sebagai motivator yang mendorong siswa untuk selalu bersemangat mencari ilmu. (Khuzaimah and Pribadi 2022, 45–46)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2010:10) mendefinisikan karakter demokratis sebagai pola pikir, tingkah laku, dan perbuatan yang menunjukkan penghargaan yang sama terhadap hak dan tanggung jawab diri sendiri dan orang lain. Hal ini terlihat dari cara siswa berinteraksi dengan teman dan kenalannya. Parker (2011:23) menegaskan bahwa demokrasi lebih dari sekadar sistem politik; ini adalah cara hidup yang tidak hanya mencakup hubungan dengan teman dan keluarga, tetapi juga interaksi dengan pengunjung, baik di pertemuan balai kota, pertemuan fakultas, atau ruang kelas. Sejak Mustar (2014: 142) mengatakan, demokrasi sangat penting dalam keberadaan manusia karena mengakui dan menghargai berbagai bentuk pengetahuan, menyoroti bahwa setiap individu memiliki perspektif unik dan emosi yang sama pentingnya. Sintesis karakter demokrasi merupakan sifat esensial yang sangat dihargai dan diperlukan bagi individu. Sifat demokratis ditandai dengan pendekatan kognitif yang menghargai dan menghormati orang lain, mengedepankan toleransi dan keterbukaan, menjunjung tinggi hak dan kewajiban individu, serta mematuhi norma-norma membangun konsensus dan mengikuti aturan.

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi sangat penting dalam situasi praktis, khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk menumbuhkan individu-individu demokratis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk secara efektif melaksanakan hak hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka. Topik ini berpusat pada proses perolehan kewarganegaraan Indonesia. Seseorang yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, keterampilan yang luar biasa, dan menunjukkan kualitas moral yang patut diteladani, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Pancasila 1945. Tanggung jawab guru dalam mendidik siswa untuk berperilaku politik merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang demokratis. Mengingat pentingnya keterlibatan siswa dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di lingkungan sekolah, penting bagi pengajar untuk tidak hanya mengajarkan konten akademis, namun juga menunjukkan contoh bagaimana cita-cita demokrasi Pancasila dipraktikkan di lingkungan sekolah. Sekolah, sebagai lembaga pendidikan terbesar kedua setelah home schooling, mempunyai peran penting dalam menumbuhkan budaya demokrasi bagi generasi penerus bangsa. Sekolah mempunyai peran penting dalam menumbuhkan budaya demokrasi di kalangan siswanya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus menunjukkan etos demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikannya. Siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan dan terlibat dalam budaya demokrasi secara efektif. Di sekolah, anak-anak diajarkan bahwa demokrasi telah menjadi praktik mendarah daging yang dianut masyarakat. Namun demikian, media arus utama sering kali melihat bahwa baik masyarakat maupun pemerintah sendiri melanggar prinsip-prinsip demokrasi, dengan sejumlah besar individu yang menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kebebasan orang lain, dan kurangnya rasa hormat terhadap keberagaman.

Cita-cita demokrasi tidak dapat diwujudkan secara efektif. Dengan menggunakan situasi sekolah, kita dapat mendidik anak-anak tentang prinsip-prinsip mempraktikkan

cita-cita demokrasi yang baik dan etis, sehingga mendorong perkembangan mereka sebagai pemimpin masa depan negara yang bertanggung jawab dan jujur. Sekolah kini memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan demokratis, yang dapat menjadi inisiatif strategis untuk mendorong demokrasi di negara Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan yang dimaksud adalah pendekatan pendidikan yang berupaya memberdayakan peserta didik menjadi pembelajar aktif melalui pembelajaran yang demokratis, partisipatif, kritis, dan kreatif. Ia juga berupaya untuk meningkatkan identitas nasional dengan mendorong pemenuhan diri melalui pendidikan.

Pendekatan pendidikan ini sangat penting bagi kemajuan pendidikan demokratis. Ruang kelas menyediakan lingkungan yang menguntungkan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam demokrasi, yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga pendidikan harus membangun budaya demokrasi dalam departemen administratif dan akademiknya. Menumbuhkan budaya demokrasi yang kuat dalam lingkungan pendidikan merupakan upaya yang menantang. Dukungan menyeluruh dari seluruh anggota komunitas sekolah diperlukan, termasuk pembentukan sistem penasehatan dalam proses pengambilan keputusan, pembentukan kelompok sekolah, dan kehadiran sekolah. Contoh sikap demokratis dan berbudaya adalah sikap saling menghormati dan mengagumi kehadiran orang dan kelompok di lingkungan sekolah, serta dukungan sekolah yang mendorong partisipasi siswa baik dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Guru dapat menjadi panutan dengan menanamkan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga memberikan standar teladan bagi siswa untuk menumbuhkan karakter demokratis. Tanpa adanya iklim demokrasi di kelas, siswa tidak mengembangkan sikap yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi.

Menurut Rosyada (2004 hal.19), tujuan sekolah bukanlah agar guru menunjukkan kemampuannya, melainkan agar siswa meningkatkan dan memperluas pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki kemampuan merumuskan pendekatan pedagogi yang memfasilitasi penyediaan prospek pendidikan bagi siswa. Penafsiran lain tentang sekolah demokratis adalah sekolah yang mengutamakan kebutuhan dan kepentingan siswa di atas kepentingan pengajar. Penting bagi anak-anak untuk melihat sekolah sebagai rumah kedua, di mana mereka dapat merasa nyaman ketika terlibat dalam berbagai kegiatan seperti belajar, berdebat, berkolaborasi dalam proyek kelompok, membaca, dan berpartisipasi dalam tugas-tugas lainnya.

Penerapan pendidikan demokratis dalam pengajaran di kelas pada hakikatnya berkaitan dengan tanggung jawab pendidik. Guru hendaknya menumbuhkan lingkungan ramah di sekolah untuk mengoptimalkan potensi belajar siswa. Mereka harus mendorong siswa untuk berkolaborasi dan bertukar informasi yang diperoleh melalui kegiatan penjangkauan. Selain itu, guru harus mengedepankan nilai-nilai demokrasi dengan mengedepankan perdebatan. Terlibat dalam perdebatan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teman-temannya, mengembangkan keterampilan komunikasi mereka, dan menumbuhkan rasa hormat terhadap beragam pendapat tanpa memaksakan pendapat mereka sendiri.

5). Pengelolaan Kelas Yang Demokratis

Sikap dan watak seorang instruktur dalam administrasi kelas merupakan elemen terpenting yang dapat mempengaruhi kepatuhan siswa terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Tindakan seperti menetapkan protokol pengelolaan kelas, mendorong ide-ide inovatif siswa, dan memastikan perlakuan yang adil terhadap siswa membantu membentuk disposisi demokratis mereka. Misalnya, instruktur mungkin menetapkan peraturan kelas dengan meminta setiap siswa di kelasnya untuk mendokumentasikan peraturan yang harus

dipatuhi. Aturan-aturan ini kemudian dapat dijadikan sebagai standar dimana ketaatan siswa terhadap peraturan yang telah mereka tulis dapat dievaluasi. Instruktur juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap pedoman adalah wajib bagi semua siswa.

Pelatihan praktis mengenai demokrasi langsung jauh lebih berhasil dibandingkan penjelasan verbal mengenai pengertian demokrasi. Selain itu, guru sekolah dasar hendaknya memberikan contoh perilaku dan sikap demokratis sebagai teladan positif bagi anak-anaknya. Pendidik harus menyeimbangkan antara bersikap terlalu ketat dan terlalu lunak dalam menegakkan peraturan yang telah disepakati bersama dengan siswa. Hal ini meningkatkan motivasi siswa dengan memupuk pemahaman mendalam tentang keuntungan nyata yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan.

Dalam bidang pendidikan, demokrasi berarti tidak adanya ketergantungan sepenuhnya pada otoritas. Sebaliknya, individu memilih jalannya sendiri berdasarkan pandangan dan kemampuannya. Pembelajaran yang difasilitasi oleh pengajar di dalam kelas merupakan wujud pendidikan demokratis, karena guru mempercayakan tugas penyampaian ilmu kepada siswa. Meski demikian, perilaku tersebut tidak bisa dianggap demokratis, karena pendidik harus memprioritaskan beberapa aspek, termasuk penggantian pendekatan pembelajaran konvensional dan taktik tidak demokratis dengan metodologi yang berpusat pada siswa dan mencakup prinsip-prinsip yang lebih demokratis. Tujuan penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah untuk mendorong partisipasi aktif siswa, pemikiran kritis yang konstan, dan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah (Sugihartono dkk., 2007, hal. 108).

Contoh ilustratifnya adalah ketika instruktur mengakomodasi preferensi siswa ketika merancang kegiatan pembelajaran. Konsekuensinya, guru harus mempersiapkan beberapa alternatif kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari isi pembelajaran yang akan dilakukan siswa di masa depan. Misalnya, dalam konteks pendidikan lingkungan, siswa terlibat dan memilih kegiatan berdasarkan preferensi mereka. Meskipun aktivitas siswa bervariasi, tema utama pendidikan lingkungan hidup tetap konsisten, memastikan bahwa topik tersebut dibahas secara aktif baik aktivitas tersebut dilakukan di dalam kelas, di lingkungan sekolah, atau di luar sekolah. Selanjutnya, instruktur dengan penuh perhatian menerima sudut pandang siswa tentang pembelajaran yang telah mereka peroleh atau temui. Belajar adalah upaya yang wajar dan egaliter bagi siswa, menumbuhkan ketenangan dan kebebasan dalam jiwa mereka (Puspitasari 2016, 245,246,248)

Di akui Paolo Feire, demokrasi Pendidikan dapat di capai dengan menciptakan kebebasan komunikasi antara guru dan siswa selama pembelajaran di ruang kelas, sehingga demokrasi Pendidikan dapat menciptakan suasana pertumbuhan yang setara atau kesetaraan kelas dan koherensi antara guru dan siswa. Siswa sendiri mempunyai beberapa pengertian, di antaranya Hamalik (2001). Siswa adalah elemen mendasar dari proses pembelajaran, bersama dengan guru, tujuan pembelajaran, dan metodologi. Di antara beberapa komponen tersebut, siswa mungkin dianggap sebagai komponen yang paling krusial.

Djamarah (2011) menegaskan bahwa peserta didik atau peserta didik merupakan fokus utama pendidikan sepanjang masa. Menurut Daradjat (Djamarah, 2011), peserta didik atau anak adalah pribadi-pribadi tersendiri yang memiliki kapasitas untuk tumbuh dan belajar. Anak atau siswa memerlukan bantuan dalam proses perkembangannya, yang dipengaruhi oleh kepribadian anak itu sendiri dan interaksinya dengan orang lain, bukan hanya ditentukan oleh guru. Berdasarkan penilaian ahli, dapat disimpulkan bahwa siswa adalah penerima atau peserta utama pendidikan, bersama dengan pengajar. Penerapan pembelajaran demokratis yang efektif memerlukan komunikasi yang terus-menerus antara

siswa dan pengajar. Pedagogi demokratis, yang mendorong partisipasi dan kolaborasi yang setara antara siswa dan instruktur, dapat diterapkan di semua tingkat pendidikan, termasuk sekolah dasar.

Menurut Suharjo (2006), sekolah dasar adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan enam tahun bagi siswa berusia 6 hingga 12 tahun. Menurut Ihsan (2008), sekolah dasar secara keseluruhan mengikuti kurikulum enam tahun. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan dasar dan menengah sebagai program pendidikan formal yang dirancang untuk siswa berusia antara 7 dan 18 tahun. Hal ini dianggap sebagai prasyarat mendasar untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut pada tingkat yang lebih tinggi. Harmon dan Johnes (2005) mencatat bahwa sekolah piagam terutama melayani siswa berusia antara 5 dan 11 tahun, atau taman kanak-kanak hingga kelas enam. Terdapat lebih dari 4.444 sekolah dasar yang mencakup taman kanak-kanak sampai kelas empat dan disebut sebagai sekolah dasar. Biasanya, sekolah menengah mengikuti sekolah-sekolah ini dan mencakup kelas lima hingga delapan. Sekolah dasar memiliki rentang kelas yang biasanya berkisar dari taman kanak-kanak hingga kelas delapan. Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan resmi yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia antara 6 dan 12 tahun. Lembaga lembaga ini berfungsi sebagai lingkungan belajar bagi siswa, yang pada akhirnya melanjutkan ke pendidikan tinggi seiring bertambahnya usia.

Kelas 6 adalah tahun terakhir sekolah dasar, di mana siswa harus berhasil menyelesaikan tes yang diperlukan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya. Sekolah dasar merupakan tempat berlangsungnya pendidikan demokrasi. Penerapan pedagogi demokratis di sekolah dasar masih banyak terjadi, dimana anak-anak terutama menerima pengajaran dari instruktur dan terbatasnya kesempatan untuk mengungkapkan keprihatinan atau gagasan. Partisipasi aktif siswa sangat diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Untuk mencegah siswa menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh pendidik atau instruktur, penting untuk menawarkan kepada mereka pilihan untuk menantang atau terlibat dalam diskusi aktif tentang apa yang mereka pelajari.

Untuk membina pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, perlu diberikan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuannya sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut diberikan hak yang sama untuk menumbuhkan kesadaran siswa dan rasa saling percaya. Memfasilitasi inisiatif kolaboratif antar organisasi yang sudah mapan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lembaga pendidikan dasar. Sebuah mekanisme telah dirancang untuk menumbuhkan kecenderungan kolektif terhadap kepatuhan terhadap peraturan sekolah.

Menumbuhkan suasana toleransi melalui inisiatif kolaboratif yang melibatkan seluruh pendidik. Guru berperan untuk mengembangkan atau membina siswa yang mendorong kegiatan untuk mengembangkan diri. Semua kegiatan di berikan hak yang sama agar siswa menjadi sadar dan mamu percaya satu sama lain. Hal itu bisa menjadikan siswa semakin pintar dan cerdas, dana saling membantu ketika ada masalah. Dengan berdiskusi dapat mengembangkan kebebasan sikap kelompok atau individu di setiap siswa. Menerapkan sikap yang sama pada siswa, dengan tidak membedakan siswa pintar atau kurang pintar termasuk dalam sikap demokratis.

6). Kurikulum Pendidikan Demokrasi

Pencantuman pendidikan demokrasi dalam kurikulum dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dievaluasi untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan penilaian pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Kurikulum pemerintah secara eksplisit memasukkan pendidikan demokrasi dan pengembangan sikap demokratis. Demokrasi

mencakup lebih dari sekedar transmisi pengetahuan dari guru ke siswa; hal ini juga memerlukan perwujudan pola pikir demokratis dalam seluruh prosesnya (Juanda dan Rahayu, 2019). Prinsip demokrasi dimasukkan guru ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Instruktur menggunakan metodologi pembelajaran penemuan. Teknik penilaian yang digunakan peserta didik dalam pendidikan kewarganegaraan didasarkan pada prinsip demokrasi, khususnya meliputi pemeriksaan sikap, pengetahuan, dan kemampuan. Teknik yang terdapat dalam RPP antara lain ceramah, debat, sesi tanya jawab, dan penugasan. Menurut Christopel dan Kuntoro (2016:15), penerapan nilai-nilai demokrasi memerlukan perubahan praktis, khususnya di bidang pendidikan, yang dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pembelajaran demokratis. Pendekatan pembelajaran demokratis memberikan proses dialogis yang memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dengan tidak adanya demokrasi di kelas, guru mengambil peran sebagai satu-satunya otoritas yang tidak dapat disangkal (Imron, 2018).

7). Pelaksanaan Pembelajaran Demokrasi

Struktur organisasi kelas memiliki empat peran kunci: wali kelas, ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Pemilihan ketua kelas ditentukan melalui proses pemungutan suara. Instruktur menawarkan siswa kesempatan untuk mencalonkan diri untuk posisi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Individu yang memperoleh jumlah suara terbanyak akan dipilih untuk peran ini. Srimadona dan Caniago (2022) berpendapat bahwa prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan melalui debat dan pemungutan suara. Instruktur menetapkan jadwal piket. Ketua kelas mengambil peran kepemimpinan dalam badan siswa.

Guru memperkenalkan siswa pada proses memfasilitasi diskusi, dengan mengajukan pertanyaan dan mengorganisir kelompok diskusi. Guru memfasilitasi dan menilai hasil belajar siswa melalui pembentukan kelompok. Sepanjang kegiatan diskusi kelompok, instruktur memberikan siswa otonomi untuk mengartikulasikan sudut pandang mereka dan memberi mereka kesempatan untuk bertanya selama proses pembelajaran. Selanjutnya, instruktur memberikan kesempatan kepada siswa untuk menampilkan hasil diskusi kelompok dalam presentasi di depan seluruh kelas. Hal ini memungkinkan siswa untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan prinsip demokrasi yang lebih besar dengan menunjukkan hasil musyawarah kolaboratif mereka. Dan mempunyai keberanian untuk mengartikulasikan sudut pandangnya di hadapan seluruh kelas. Siswa lain dengan penuh perhatian mendengarkan hasil drama tersebut, berusaha untuk mengagumi dan menghormati teman mereka. Meskipun berbagai perspektif diungkapkan dalam diskusi kelompok atau presentasi, kegiatan seperti itu mendorong pembelajaran aktif di kalangan siswa di kelas. Terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok dapat memberikan hasil yang produktif (Gonzalez dan DeJarnette, 2015). Dalam penelitiannya, Faizah, Subanji, dan Susiswo (2021) berpendapat bahwa faktor kunci yang harus diperhatikan dalam membentuk kelompok adalah keahlian anggota, kemampuan berkomunikasi secara efektif, dan tingkat keterbukaan.

Upaya untuk mendorong penanaman cita-cita demokrasi dalam dunia pendidikan melalui penerapan pendidikan kewarganegaraan. Ardy, Muhamad, Irham, dan Wiyani (2013:90) berpendapat bahwa nilai-nilai dapat dimasukkan ke dalam proses pembelajaran melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Rencana pembelajaran guru mencakup prinsip-prinsip demokrasi seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan mencakup beberapa dimensi penting, khususnya: (1) kurikulum pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar harus didasarkan pada kerangka ilmiah yang ketat, (2) fungsi pendidikan kewarganegaraan harus

memberdayakan dan membekali siswa dengan kompetensi dan atribut yang terpuji. , dan (3) pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan harus mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan demokratis siswa, keterampilan mengambil keputusan, dan penanaman lingkungan dialogis di kalangan siswa, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya masyarakat demokratis (Darmansyah, Susanti, and Sianturi 2023, 224–30)

KESIMPULAN

Sebaliknya, pendidikan berfokus pada pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa. Guru juga wajib menunjukkan keteladanan sebagai pendidik di dalam kelas. Mengajar pada dasarnya melibatkan mengarahkan siswa dalam proses memperoleh pengetahuan. Sebagai seorang pendidik, mengajar merupakan tugas wajib dan dapat dipertanggungjawabkan yang harus dipenuhi, sehingga menjadikan proses belajar mengajar sebagai hakikat pendidikan.

Demokrasi menurut Pancasila adalah suatu bentuk pemerintahan yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan cita-cita yang dituangkan dalam pandangan hidup Pancasila. Indonesia dahulu menganut falsafah demokrasi Pancasila. Pengertian pengertian demokrasi tentunya bersumber dari teori kehidupan bernegara Indonesia, Pancasila. Demokrasi merupakan istilah majemuk yang berasal dari kata Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan.

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dan kekuasaan pengambilan keputusan. Sekolah adalah lembaga sosial yang disengaja yang diciptakan oleh individu-individu yang bekerja sama untuk menyelaraskan tujuan mereka guna mencapai tujuan bersama. Pancasila berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menentang liberalisme dan sekularisme. Menurut Sadima dkk, belajar merupakan suatu proses rumit yang terjadi pada setiap individu dan berlangsung terus menerus sepanjang hidupnya, dimulai dari masa bayi hingga akhir hayatnya.

Belajar adalah suatu proses yang disengaja yang bertujuan untuk menghasilkan kegiatan pendidikan pada manusia. Pembelajaran adalah serangkaian tindakan yang disengaja yang dirancang untuk memfasilitasi penerapan pengetahuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah pertukaran dinamis yang terjadi sepanjang proses pendidikan antara siswa dan instruktur. Pembelajaran interaktif harus mengedepankan demokrasi untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh siswa, menghilangkan segala kesenjangan.

Pembelajaran berlangsung dalam sistem pendidikan yang beroperasi secara demokratis, memastikan kesempatan yang sama bagi semua siswa sekaligus menyenangkan. Dalam demokrasi pendidikan, model pembelajaran harus menghindari lingkungan tegang yang ditandai dengan instruksi dan perintah yang berlebihan, karena hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi pasif dan kurang antusias ketika terlibat aktif dalam percakapan dengan dosennya. Selain itu, pengajar juga berperan sebagai katalis, dimana mereka harus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang mengedepankan dialog dan menekankan pada proses pembelajaran. Guru berfungsi sebagai mediator, membimbing siswa, dan sebagai motivator, memberikan inspirasi kepada siswa untuk mempertahankan antusiasme yang konstan dalam memperoleh informasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan karakter demokrasi sebagai pola pikir, perilaku, dan perbuatan yang sama-sama menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan pengertian dan pemahaman karakter demokrasi, sintesa karakter demokrasi merupakan sifat yang esensial bagi seorang individu. Prinsip-prinsip demokrasi harus diterapkan secara aktif dalam situasi praktis, dengan penekanan khusus pada pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan semacam ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk secara efektif melaksanakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang demokratis. Seseorang yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi, keterampilan yang luar biasa, dan menunjukkan kualitas moral yang patut diteladani, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Pancasila 1945. Tanggung jawab guru dalam mendidik siswa untuk berperilaku politik merupakan bagian integral dari pendidikan nasional yang demokratis.

Di sekolah, anak-anak diajarkan bahwa demokrasi telah menjadi praktik mendarah daging yang dianut masyarakat. Namun demikian, media arus utama sering melihat bahwa baik masyarakat maupun pemerintah sendiri melanggar prinsip-prinsip demokrasi, dengan sejumlah besar individu yang menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kebebasan orang lain, dan kurangnya rasa hormat terhadap keberagaman. Dengan menggunakan situasi sekolah, kita dapat mendidik anak-anak tentang prinsip-prinsip mempraktikkan cita-cita demokrasi yang baik dan etis, sehingga mendorong perkembangan mereka sebagai pemimpin masa depan negara yang bertanggung jawab dan jujur. Sekolah kini memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan demokratis, yang dapat menjadi inisiatif strategis untuk mendorong demokrasi di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda.

Membangun budaya demokrasi yang kuat di lingkungan pendidikan merupakan upaya yang menantang. Menunjukkan sikap demokratis dan budaya berarti menghargai dan mengakui kehadiran orang-orang dan organisasi di lingkungan sekolah, serta mendukung sekolah yang mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Tanpa adanya lingkungan demokratis selama pengajaran di kelas, anak-anak tidak akan mengembangkan pandangan-pandangan mengakar yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran sekolah demokratis dan pengelolaan kelas yang efektif berdampak signifikan terhadap perilaku guru dan siswa, sehingga mendorong pendekatan positif dalam semua aspek.

Sikap dan tindakan guru sekolah dasar dalam pengelolaan kelas merupakan faktor penentu penting yang mungkin berdampak signifikan terhadap pandangan demokratis siswa. Guru dapat menetapkan peraturan kelas dengan meminta masukan individu dari setiap siswa, yang kemudian akan mendokumentasikan peraturan yang harus dipatuhi. Aturan-aturan ini dapat berfungsi sebagai standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan siswa terhadap aturan mereka sendiri. Pelatihan praktis mengenai demokrasi langsung jauh lebih berhasil dibandingkan penjelasan verbal mengenai pengertian demokrasi. Selain itu, guru sekolah dasar harus memberikan contoh perilaku atau sikap demokratis sebagai teladan positif bagi anak-anak. Guru harus menjaga keseimbangan antara bersikap terlalu keras atau terlalu lunak dalam menegakkan norma norma yang telah ditetapkan oleh siswa.

Latihan-latihan ini meningkatkan motivasi siswa dengan menumbuhkan pemahaman mendalam tentang keuntungan nyata yang diperoleh dari menyelesaikan tugas. Pembelajaran yang difasilitasi oleh instruktur di dalam kelas merupakan wujud pendidikan demokratis, karena guru mempercayakan tugas kepada siswa untuk menginstruksikan isi pembelajaran. Meskipun demikian, perilaku tersebut tidak dapat dianggap demokratis, karena para pendidik harus memprioritaskan banyak aspek, termasuk penggantian pendekatan pembelajaran konvensional dan taktik otoriter dengan metodologi yang

berpusat pada siswa yang secara inheren lebih demokratis. Dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tujuannya adalah agar siswa terlibat secara aktif, konsisten menggunakan kemampuan berpikir kritisnya, serta mengevaluasi dan menyelesaikan masalah secara efektif.

Contoh ilustratifnya adalah ketika instruktur mengakomodasi preferensi siswa ketika merancang kegiatan pembelajaran. Konsekuensinya, guru harus merancang beberapa alternatif kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari isi pembelajaran yang akan dilakukan siswa di masa depan. Misalnya, dalam konteks pendidikan lingkungan, siswa terlibat dan memilih kegiatan berdasarkan preferensi mereka. Selanjutnya, instruktur dengan penuh perhatian menerima sudut pandang siswa tentang pembelajaran yang telah mereka peroleh atau temui. Belajar adalah upaya yang efektif dan egaliter bagi siswa, menumbuhkan ketenangan dan otonomi dalam jiwa mereka. Paolo Feire mengakui bahwa demokrasi pendidikan dapat dicapai dengan membina komunikasi terbuka antara pengajar dan siswa di kelas. Hal ini mendorong lingkungan pembangunan yang adil dan harmonis antara guru dan siswa.

Menurut Daradjat, murid atau anak adalah pribadi-pribadi yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan belajar. Anak atau siswa memerlukan bantuan dalam proses perkembangannya, yang dipengaruhi oleh kepribadian anak itu sendiri dan interaksinya dengan orang lain, bukan hanya ditentukan oleh guru. Menurut Suharjo, sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum pendidikan enam tahun bagi siswa berusia 6 hingga 12 tahun. Lebih lanjut, hal ini sejalan dengan pernyataan Ihsan yang menyatakan bahwa sekolah dasar menganut kurikulum enam tahun sebagai satu kesatuan yang terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmansyah, Ady, Atika Susanti, and Helen Sianturi. 2023. "Edubase : Journal of Basic Education Aktualisasi Pengembangan Nilai Demokrasi Siswa SDN 03 Bengkulu Tengah." 4: 223–34.
- Dwi Shafira, Artha. 2021. "Demokrasi Pancasila Artha Dwi Shafira Pawestri S1 Farmasi Iik Strada Indonesia."
- Kartini, Dewi, and DinieAnggraeni Dewi. 2020. "Implementasi Pancasila Dalam Pendidikan Sekolah Dasar." *Journal of education, Psychology, and Counseling* 3(1): 1.
- Khuzaimah, and Farid Pribadi. 2022. "Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Siswa Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 4(1): 41–49.
- Pancasila, Demokrasi, Bhineka Tunggal, and Ika Solusi. "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas Idjang Tjarsono *." : 881–94.
- Puspitasari, Wina Dwi. 2016. "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Di Sekolah Dasar." *Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreativitas, Komunikasi, dan Kolaborasi dalam Pembelajaran Abad 21: Inovasi Pembelajaran Abad 21* 2: 244–49.
- Syahindra, Ok M Daniel. 2019. "PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DI SEKOLAH Ok. M. Daniel Syahindra." *Jurnal Hikmah* 16(2): 67–75.